



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

6.1. STRATEGI

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada gambar 6.1.

Gambar 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah

SASARAN	STRATEGI				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya angka melek huruf 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah 4. Meningkatnya angka harapan hidup 5. Meningkatnya pendapatan per kapita	S [1] Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	S [2] Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan			
6. Menurunnya tingkat kemiskinan 7. Menurunnya tingkat pengangguran 8. Meningkatnya daya beli masyarakat 9. Menurunnya Indeks Gini	S [3] Percepatan pengentasan kemiskinan	S [4] Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja			
10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah 12. Tercapainya swasembada pangan 13. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	S [5] Pengembangan ekonomi kerakyatan	S [6] Percepatan transformasi ekonomi			
14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	S [7] Pengembangan agribisnis	S [8] Peningkatan produksi pangan			
15. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 16. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	S [9] Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	S [10] Peningkatan kualitas infrastruktur dasar			
18. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan 19. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	S [11] Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	S [12] Peningkatan kualitas lingkungan hidup			

Berdasarkan gambar 6.1 diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Kedua belas prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, meliputi:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
6. Percepatan transformasi ekonomi;
7. Pengembangan agribisnis;
8. Peningkatan produksi pangan;
9. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penjelasan masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia



secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sehingga kualitas SDM secara otomatis akan membaik. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah akan menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dalam pembuktian kualitasnya, output pendidikan belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian dari lembaga yang independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan konsisten. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat provinsi

Gambar 6.3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan



Kalimantan Timur. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan dibidang ini secara mendasar.

3. Percepatan pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Gambar 6.4
Percepatan Pengentasan Kemiskinan



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan beberapa upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan cara mengefektifkan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial

perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.

Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini menjadi perlu, mengingat upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA di masing-masing wilayahnya.

Faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan diantaranya SDM, SDA, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain karena kemiskinan merupakan ketidakseimbangan potensi ekonomi masyarakat sebagai pelaku ekonomi sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki andil secara efektif dalam proses pembangunan atau bahkan tidak menikmati hasil-hasil pembangunan (pembangunan belum merata).

Strategi percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap meskipun rumit karena permasalahannya sangat kompleks. Perencanaan dan strategi yang matang dalam pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan program-program yang tepat sasaran. Jika hal tersebut diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang proporsional, maka bukan tidak mungkin percepatan pengentasan kemiskinan terlaksana semaksimal dan seoptimal mungkin.

4. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Strategi dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya

yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan.

Diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Perlu diketahui bahwa kondisi daerah yang kondusif

merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, SDM daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan *impact* dari peningkatan SDM dan infrastruktur.

5. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam/agraria secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam pengontrolan dan pengelolaan pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuhkan-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan ekonomi lokal

Gambar 6.5
Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah, maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertangguh perekonomian daerah.

Gambar 6.6
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan



Perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat terkendali dan konsisten dengan mengupayakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada kestabilan harga bahan baku sehingga menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan

adanya kestabilan harga, diharapkan akan menambah investasi pada sektor UMKM serta memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM sehingga berdampak pada terkendalinya tingkat inflasi pada perekonomian daerah. Pada hakekatnya pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menumbuhkan/meningkatkan kegiatan perekonomian pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Melalui peran pemerintah daerah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian rakyat kecil dapat terangkat dan otomatis meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan pada sektor ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, tetapi juga pada wilayah pelosok (terpencil/pedalaman) sehingga pemerataan pembangunan antar daerah dapat terwujud. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dapat dengan mantap mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur secara adil dan merata.

6. Percepatan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi dilakukan dengan memperbaiki struktur ekonomi yang awalnya berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang. Selanjutnya, pembangunan ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masa mendatang.

Transformasi ekonomi menuju keseimbangan merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat (pendapatan per kapita) meningkat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan kalangan buruh. Dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dan berkelanjutan, diperlukan beberapa upaya prioritas seperti pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, menjaga stabilitas harga, pengembangan pusat-pusat

Gambar 6.7
Percepatan Transformasi Ekonomi



pertumbuhan ekonomi baru, pemanfaatan SDA tak terbaharukan secara optimum dengan memperhatikan keberlanjutannya, peningkatan ekspor produk olahan, dan peningkatan investasi daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan transformasi ekonomi yang merupakan tantangan strategi dalam meningkatkan perekonomian mampu menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang

berkualitas sehingga pendapatan per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat secara merata.

Perencanaan yang matang pada percepatan transformasi ekonomi perlu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan perbaikan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung proses transformasi ekonomi seperti kualitas dan kuantitas SDM, SDA, serta sistem manajemen yang handal. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, peluang transformasi ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur menuju struktur ekonomi yang berkelanjutan dapat terealisasi dengan syarat konsistensi dari perencanaan hingga evaluasi tetap dijaga.

7. Pengembangan Agribisnis

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. Agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada Provinsi Kalimantan Timur) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. Selanjutnya, pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.

Agribisnis sangat berkaitan erat dengan sektor pertanian sehingga pada strategi pengembangan agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Kemudian hal itu dilanjutkan dengan upaya menghubungkan infrastruktur dasar menuju sentra agribisnis melalui pemenuhan infrastruktur industri dalam mengolah hasil-hasil pertanian. Agribisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri-industri pengolah hasil pertanian. Selanjutnya, proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu ke hilir. Penyempurnaan pada pengembangan agribisnis ini adalah dengan peningkatan produktivitas agar produk lebih dapat berkembang dan pemasaran hasil-hasil industri

Gambar 6.8
Pengembangan Agribisnis



demikian menunjang proses keuangan yang berpengaruh pada proses operasional produksi. Terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan menempatkan UKM dan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra industri menjadi variabel penting.

Kondisi lahan Provinsi Kalimantan Timur yang cukup luas menjadi salah satu pendukung utama dalam pengembangan agribisnis. Fokus agribisnis Provinsi Kalimantan Timur adalah memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat yang memiliki *"multiplier effects"* tinggi dengan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Dengan fokus seperti di atas, maka pengembangan agroindustri akan menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah sekaligus memperluas lapangan pekerjaan yang berkualitas.

8. Peningkatan Produksi Pangan

Gambar 6.9
Peningkatan Produksi Pangan



Ancaman ketahanan pangan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena perkembangan sektor pertanian Provinsi Kalimantan Timur cukup memprihatinkan yang terpapar sebagai isu terbaru dalam *Simposium International The 5th Head of research Councils in Asia*

(ASIAHORCs) di Bali. Oleh karena itu, sebelum terjadi krisis pangan pada Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah harus melakukan tindak pencegahan terlebih dahulu.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yakni melalui peningkatan produksi pangan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kegiatan agribisnis melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian berdaya saing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang mendukung dalam menciptakan produk-produk pangan. Selain itu, perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi pada produk pangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan dapat menjadi pendukung dalam memperkuat cadangan pangan. Dengan berbagai pengupayaan tersebut, peningkatan produksi pangan untuk Provinsi Kalimantan Timur dapat terpenuhi dan optimis masyarakat Provinsi Kalimantan Timur akan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

Gambar 6.10

Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan



Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. Pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari penerangan, transportasi, proses produksi, dan berbagai hal lainnya memerlukan ketersediaan energi. Ketergantungan masyarakat modern pada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan lain sebagainya menjadi permasalahan dan perbincangan utama di seluruh negara.

Di sisi lain, cadangan minyak bumi dan gas alam Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan habis dalam waktu 25 tahun mendatang. Ketersediaan cadangan minyak bumi yang semakin menipis disertai peningkatan kebutuhan energi mendorong manusia melakukan pengembangan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif salah satunya dari alam yang dapat berupa tenaga air, uap air, angin, matahari, panas bumi, pasang surut air laut, gelombang laut, nuklir, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi biomassa.

Kawasan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam melimpah dan beraneka ragam. Dengan pemanfaatan SDA sebagai energi yang ramah lingkungan sudah sebijaknya menjadi prioritas utama dalam pengembangan sumber energi alternatif. Ketersediaan sinar matahari dan angin sebagai alternatif penghasil energi merupakan

potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dengan berbagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan inilah yang akan menopang aktivitas manusia di masa depan dengan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Gambar 6.11
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar



Infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah mengingat

infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Upaya pembangunan infrastruktur dasar diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan *prototype* kawasan berkembang sekitarnya. Seperti kita ketahui, infrastruktur dasar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sudah seyogianya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Gambar 6.12
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan



11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah

dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal.

Memahami terkait reformasi birokrasi, pada prinsipnya terdapat lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Hingga saat ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu-isu mengenai lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat semua negara di dunia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya penuh dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mengedepankan kelestarian alam. Sedangkan maksud dari pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya berencana secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga.

Gambar 6.13
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan

ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan terjaganya komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia.

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

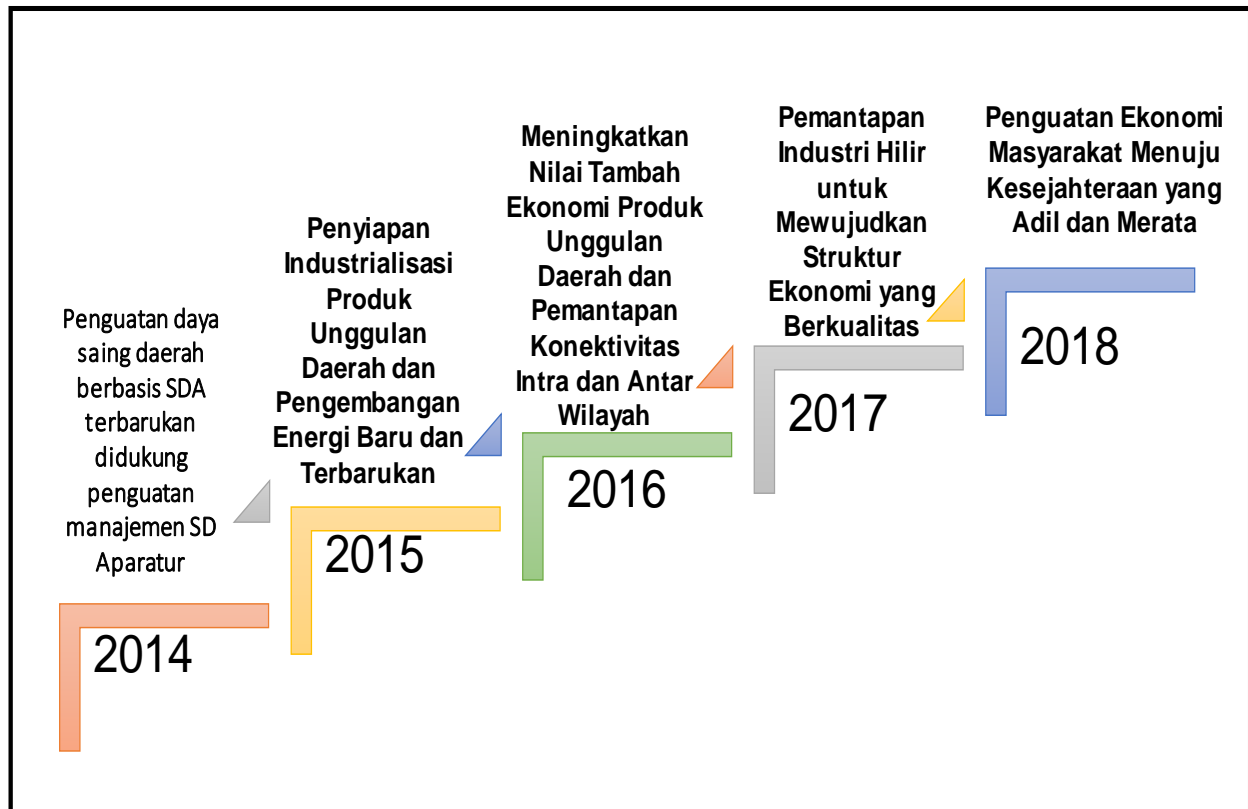
Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota termasuk SKPD yang terlibat di dalamnya.

6.2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 6.14.

Gambar 6.14
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, RKPD Tahun 2014-2018



Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap tahun sebagaimana berikut.

Tabel 6.1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas & Sasaran RKPD)					
		Pernyataan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang melek huruf					
		Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar					
		Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan					
		Peningkatan kesempatan belajar anak					
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses di bidang kesehatan					
		Peningkatan mutu di bidang kesehatan					
3	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin					
		Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja					
		Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin					
		Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin					
4	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan lapangan kerja					
		Peningkatan kualitas tenaga kerja					
		Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja					
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Pengarusutamaan Gender					
		Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang					

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas & Sasaran RKPD)					
		Pernyataan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan investasi sektor UMKM					
		Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga					
6	Percepatan transformasi ekonomi	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global					
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru					
		Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)					
		Peningkatan ekspor produk olahan					
		Pengembangan ekowisata					
7	Pengembangan agribisnis	Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah					
		Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis					
		Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis					
		Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah					
8	Peningkatan produksi pangan	Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan;					
		Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian					

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas & Sasaran RKPD)					
		Pernyataan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi					
		Peningkatan infrastruktur pertanian					
		Peningkatan produktivitas pertanian					
		Perbaikan tata niaga produk pangan					
9	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan					
		Peningkatan rasio elektrifikasi					
10	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi					
		Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan;					
		Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan					
11	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus;					
		Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur;					
		Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik					
12	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan					
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.					
		Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (<i>green economy</i>) yang ramah lingkungan dan					

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas & Sasaran RKPD)					
		Pernyataan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berkelanjutan					
		Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi					
		Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan					
		Penegakan hukum lingkungan					
		Penurunan emisi gas rumah kaca					
		Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah					

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi						
1	Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1	Meningkatnya IPM	Strategi 1 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan		
		2	Meningkatnya angka melek huruf		2014	Peningkatan kesadaran masyarakat
		3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah		2015-2016	Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar
					2017-2018	Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan
					2014-2018	Peningkatan kesempatan belajar anak
		4	Meningkatnya angka harapan hidup	Strategi 2 : Peningkatan kualitas layanan kesehatan	2014-2015	Peningkatan akses di bidang kesehatan;
					2016-2018	Peningkatan mutu di bidang kesehatan
		5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan	2017-2018	Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
					2014-2016	Pengarusutamaan gender
MISI II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan						
2	Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	2014	Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
					2015-2016	Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja
					2017-2018	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
					2014-2018	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
		7	Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 4 : Peningkatan dan	2014	Perluasan lapangan kerja;
					2015-2016	Peningkatan Kualitas tenaga kerja

VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau			Perluasan Kesempatan kerja	2017-2018	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
		8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan	2014-2018	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
					2015-2018	Peningkatan investasi sektor UMKM
					2017-2018	Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
		9	Menurunnya Indeks Gini			
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi	2014-2018	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
					2014-2016	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
					2015-2018	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
					2015-2018	Peningkatan ekspor produk olahan
					2017-2018	Pengembangan ekowisata
		11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Strategi 7: Pengembangan agribisnis	2014-2018	Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah
					2014 - 2018	Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis
					2015-2018	Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis
					2015-2018	Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
		12	Tercapainya swasembada beras	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	2014 - 2018	Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan;
					2014 - 2018	Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
					2014-2018	Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
					2014 - 2018	Peningkatan infrastruktur pertanian
					2015 - 2018	Peningkatan produktivitas pertanian
					2018	Perbaikan tata niaga produk pangan
		13	Meningkatnya	Strategi 9 :	2014-2018	Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan

VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
			pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	2014-2018	Peningkatan rasio elektrifikasi
MISI III : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata						
4	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	2014-2018	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
					2014-2018	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan
					2014-2018	Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik						
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	2014-2018	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus
		16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik		2014-2018	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
		17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja		2017-2018	Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan Reformasi birokrasi (RB) dan tatakelola pemerintahan yang baik
Misi V : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim						
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Strategi 12 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2014-2018	Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan
					2015-2018	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.
					2014-2018	Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN							
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		
					2014 - 2018	Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi	
					2014-2018	Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	
					2014-2018	Penegakan hukum lingkungan	
		19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		2014-2018	Pengarusutamaan perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan	
					2014-2018	Penurunan emisi gas rumah kaca	

6.2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memerhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Gambar 6.15
Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2031

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi diidentifikasi melalui:

- penentuan sektor-sektor kunci dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur,
- Penentuan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota,
- Preferensi investasi di masing-masing kabupaten/kota,
- Pengembangan kebijakan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah, serta
- Pengklasifikasian karakteristik tingkat perkembangan masing-masing kabupaten/kota.

Arah pengembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan melalui penentuan kawasan-kawasan strategis ekonomi dengan mempertimbangkan potensi perkembangan sektor-sektor di setiap kabupaten/kota, prioritas sektor unggulan apa yang dikembangkan di kawasan tersebut, penelaahan sektor kunci perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, serta kebutuhan infrastruktur pendukung wilayah dan potensi kerjasama antar daerah. Sedangkan prioritas investasi jangka pendek dan jangka panjang menjadi input untuk menetapkan fokus sektor pada setiap kawasan strategis yang dikembangkan.

Di dalam PP nomor 26 tahun 2008 mengenai RTRW Nasional telah ditetapkan kawasan strategis nasional khususnya di Kalimantan Timur dari perspektif kepentingan ekonomi yakni: Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Sangkulirang-Sangatta-Muara Wahau (SASAMAWA), Kawasan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM dan sekitarnya), serta Kawasan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya. Kawasan strategis tersebut memiliki sektor-sektor penghasil produk unggulan seperti industri pengolahan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata. Selain itu juga disusun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-Sanga sanga-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA).

Adapun kawasan strategis yang ditetapkan di tingkat Provinsi (Kawasan Strategis Provinsi) meliputi;

1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha. Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier.

Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan *Freeway* (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan) dengan bagian tengah (Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Bontang) serta bagian utara (Kutai Timur dan Berau). Berdasarkan RTRW

Nasional, Kota Samarinda termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-(Sanga-Sanga)-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

3. Kawasan Industri Petrokimia (Gas dan Kondensat) di Kota Bontang

Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *Industrial Estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Terkait dengan hal tersebut, saat ini tengah dilakukan proyek Pembangunan Pabrik Pupuk Kalimantan Timur V dengan nilai investasi sebesar 6,08 triliun rupiah yang nantinya akan menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3.500 ton urea per hari dan 2.500 ton amoniak per hari.

4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, *oleo chemical*, dan industri turunannya. Berdasarkan Masterplan 2012, tahap awal pembangunan KIPI Maloy seluas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 trilyun rupiah. KIPI Maloy terdiri dari 6 (enam) zona industri, yaitu:

- a. Zona Industri Oleokimia Dasar,
- b. Zona Industri Berbasis Makanan,
- c. Zona Industri Biodiesel,
- d. Zona Industri Produk Perawatan,
- e. Zona Industri Produk Sampingan, dan
- f. Zona Industri Lainnya.

KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang dioperasikan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Pada tahun 2030, KIP Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

5. Kawasan Strategis yang Dapat Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di Perbatasan Negara

Kawasan tertinggal merupakan suatu kawasan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sesuai dengan standar taraf hidup suatu daerah. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena kemiskinan secara struktural dan natural dimana kemiskinan struktural terkait faktor struktur sosial sedangkan kemiskinan natural terkait faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam termasuk minimnya berbagai infrastruktur dasar sebagai daya dukung pembangunan daerah.

Penetapan kawasan tertinggal ditentukan melalui perhitungan tingkat kemiskinan relatif antar kabupaten/kota berdasarkan kategori wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Wilayah yang termasuk kategori kawasan tertinggal dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan kawasan terpencil pada dasarnya tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan dengan sebaran wilayah tertinggal dan terpencil yang berada di perbatasan terutama berada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha merupakan kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat (berdasarkan UU. Nomor 2 Tahun 2013) memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham.

Klaster industri kawasan perbatasan diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Perdesaan dalam kawasan tertinggal yang merupakan fokus utama untuk dipacu pertumbuhannya melalui paradigma perencanaan yang lebih kompeten diantaranya Datar Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Pahangai II, Long Pahangai I, Long Pakak, Long Penaneh II, Long Penaneh I, Long Penaneh III, Long Tuyuq, Naha Aru, Naha Tifab, Tiong Buu, Tiong Ohang, Repama, Pa' Upan, Long Ruangan, Buduk Kubul, Long Puak, Wa' Laya, KP. Baru, Pa' Kebuan, Wa' Jagung, Samalat, Malutok, Sipatal, Sibalu, Panas, Tatalunjuk, Sedalan, Buatan, Simantobol, Liang, Debulan, Simalumung, Likas, Sesibu, Liang.

Adanya pengembangan kawasan tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat

meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan kawasan tersebut akan dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Masing-masing kawasan industri memiliki potensi dan keunggulan masing-masing serta saling berkaitan. Keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu keterhubungan/interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, sehingga akan terbentuk interelasi antar kawasan industri, antar provinsi, regional, nasional, bahkan internasional.

6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha.

Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

7. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, dukungan investor untuk menanamkan investasinya dalam proyek besar pengembangan klaster industri pertanian menjadi harapan bagi pemerintah.

Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negoisasi untuk hutan primer.

Melihat tantangan serius tersebut, kelanjutan pengembangan kelapa sawit dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, semestinya bukan hanya menjadi bahasan pro dan kontra, tetapi menjadi satu keharusan. Demi terwujudnya kawasan agropolitan regional tersebut, pemerintah dan swasta sebagai pengelola harus berpikir ke depan agar keberhasilan perekonomian dapat tumbuh tanpa ada pihak yang dirugikan baik itu masyarakat maupun lingkungan.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan yang jelas, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

Penetapan kawasan strategis sosio-kultural di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara

Museum Mulawarman terletak di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Museum Mulawarman adalah istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti Istana sebelumnya yang terbakar dan diresmikan pada tanggal 25 November 1971 kemudian diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Februari 1976.

Museum yang sebelumnya adalah bangunan Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ini didirikan pada tahun 1932 oleh Pemerintah Belanda yang menyerahkan Keraton kepada Sultan Adji Muhammad Parikesit pada tahun 1935. Bahan bangunannya didominasi oleh beton mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat, hingga atap. Di halaman depan Museum terdapat duplikat Patung Lembuswana yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara. Arsitektur dari museum ini mengadopsi dari arsitektur tradisional Suku Dayak yang ada di Kutai.

Di Kutai Kartanegara, setiap tahun dilaksanakan Upacara Erau, yaitu tarian Khas Kedaton Upacara Adat dan Mengulur Naga di Desa Kutai Lama. Selain itu, pada setiap pelaksanaan Erau juga ditampilkan atraksi seni budaya baik berupa tarian tradisional maupun upacara adat dari berbagai suku lainnya di Indonesia serta mancanegara.

Museum Mulawarman terdiri dari dua lantai dimana tersimpan benda-benda sejarah yang pernah digunakan oleh kesultanan seperti Singgasana, Tempat Peraduan, Pakaian Kebesaran, Tombak, Keris, Meriam, Kalung, Prasasti Yupa, serta Koleksi Keramik Cina. Di belakang museum, pengunjung bisa berbelanja cinderamata khas budaya Dayak, batu perhiasan, maupun cendera mata lainnya..

Selain yang tersebut di atas, kini telah dibangun Balai Kedaton sebagai tempat kediaman Sultan Aji Muhammad Salehuddin II yang telah dinobatkan kembali pada tahun 2002. Di dalam lingkungan Istana kesultanan terdapat pemakaman keluarga kerabat Kerajaan Kutai Kartanegara serta Masjid Jami' Aji Amir Hasanuddin sebagai saksi masuknya Islam di Kutai

2. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda

Desa Budaya Pampang adalah sebuah desa budaya yang berlokasi di Sungai Siring, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekitar tahun 1960-an, Suku Dayak Apokayan dan Kenyah yang saat itu berdomisili di wilayah Kutai Barat dan Malinau hijrah karena tidak mau bergabung atau tidak ingin ikut ke wilayah Malaysia meskipun taraf pendapatan atau ekonomi yang menjanjikan di negeri tetangga tersebut. Rasa nasionalisme mereka inilah yang membuat mereka memilih tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pindah ke desa yang saat ini dinamai Desa Pampang.

Pada bulan Juni 1991, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H.M. Ardans mencanangkan dan meresmikan Desa Pampang sebagai Desa Budaya. Melalui desa ini, pemerintah berharap Provinsi Kalimantan Timur tetap memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Pemerintah juga merasa antusias bahwa desa budaya ini memiliki kegiatan positif yang bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Desa Budaya Pampang diharapkan dapat dijadikan sebagai cagar budaya guna mengoptimalkan nilai sosial dan budaya tempat tersebut.

Selain itu, pemerintah mendukung agar warga Dayak yang menghuni Desa Pampang untuk bisa mengembangkan potensi lain yang mendukung kehidupan mereka misalnya membuat cinderamata seperti manik-manik dan sejenisnya agar menjadi ciri khas wilayah tersebut.

Desa Budaya Pampang, kini kerap kali dikunjungi oleh tamu-tamu VIP yang datang ke Provinsi Kalimantan Timur baik dari Indonesia maupun mancanegara. Para pengunjung merasa penasaran ingin melihat langsung eksotisme budaya, adat istiadat, dan sosok masyarakat dayak yang memang sudah dikenal dunia.. Puncaknya, setiap tahun digelar acara memperingati ulang tahun Desa Pampang yang disebut dengan nama *Pelas Tahun*.

3. Koridor Sungai Mahakam (Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Lamin Eheng)

Kawasan Koridor **Sungai Mahakam hingga ke hulu: Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Kersik Luway, Lamin Eheng** di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam upaya meningkatkan apresiasi seni/budaya bernilai tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada umumnya kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial/budaya tidak lepas dari potensi pariwisata. Pengembangan pariwisata dilakukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat dan lingkungannya. Beberapa alasan utama pengembangan kawasan pariwisata adalah manfaat ekonomi dengan masuknya devisa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pengembangan pariwisata juga dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan fisik maupun sosial budaya masyarakat setempat

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan sesuai dengan tupoksinya, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kondisi ekosistem Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami kerusakan dan semakin parah di setiap tahunnya sehingga diperlukan upaya-upaya konkret untuk mencapai kondisi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan terkait tata kelola pemerintahan berwawasan lingkungan (*Green Governance*). Hal ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat kebijakan *Green Governance* akan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Timur serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan kalangan Swasta, menyadari bahwa telah terjadi pemanasan global yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Dalam konteks wilayah Provinsi Kalimantan Timur, salah satu penyebab pemanasan global adalah deforestasi dan degradasi lahan terutama hutan sehingga penting untuk melakukan pencegahan terhadap pengrusakan hutan dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki kualitas hutan melalui restorasi, reboisasi, dan rehabilitasi lahan (terutama hutan). Dalam perkembangannya, Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun kualitas lingkungan hidupnya.
2. Mengurangi ancaman bencana ekologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Mengurangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan kualitas ekosistem darat, air, dan udara di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kesadaran seluruh pihak baik pemerintah, swasta, serta masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, terhadap kepentingan pelestarian sumber daya alam terbaharui serta pemanfaatan secara bijak sumber daya alam tidak terbaharui.

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga kawasan tersebut diakui sebagai warisan dunia. Kawasan yang disebut sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi tersebut tidak dapat dialihfungsikan karena digunakan sebagai pelestarian sumber daya alam sekaligus menjadi kawasan perlindungan bawahannya. Selain kawasan di atas, terdapat pula kawasan lindung prioritas yang diutamakan untuk mengembangkan dan membudidayakan tanaman keras.

Kawasan yang diprioritaskan dalam upaya meningkatkan fungsi kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di:

1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Maninjau, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya

Permasalahan utama danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingginya tingkat sedimentasi bahkan tiga danau besar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Malintang (11.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Jempang (15.000 ha), memiliki tingkat sedimentasi tinggi yang mencapai sekitar 70 persen total kawasan. Tingginya tingkat sedimentasi menyebabkan kedalaman air yang tersisa hanya sekitar setengah hingga dua meter yang menyebabkan berkurangnya fungsi danau sebagai kawasan resapan air. Dengan demikian, resiko banjir akan meningkat pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau padang delta yang mencuat ke permukaan kian meluas. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas industri perhutanan di daerah aliran sungai di sebelah hulu kawasan danau memicu sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.

Danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur, selain menjadi kawasan tangkapan air hujan di pedalaman Mahakam juga berfungsi sebagai habitat berbagai satwa termasuk Belibis Kembang serta Kerbau Kalang. Burung Belibis Kembang (*Dendrocygna arcuata*) berfungsi sebagai motor produktifitas danau Mahakam dengan menyebarkan biji-biji rumput serta berkontribusi memberikan nutrisi (kotoran) terhadap ikan sedangkan Kerbau Kalang memiliki ciri khas, yakni bisa bertahan hidup dalam rawa-rawa pada danau tanpa penanganan yang rumit. Kerbau Kalang sebenarnya merupakan jenis "kerbau rawa" (*swamp buffalo*) yang dipelihara dengan sistem kalang, yaitu pada waktu musim banjir ternak ditampung dalam kandang yang disebut "kalang", sedangkan pada musim kemarau kerbau dilepas sepanjang hari ke dalam hutan atau rawa-rawa. Disekitar danau juga terdapat puluhan ribu petani/nelayan yang bergantung hidupnya sebagai petani yang mengelola potensi pertanian pada lahan rawa-rawa serta perikanan darat.

Kerusakan lingkungan danau akan mengganggu keseimbangan ekosistem sehingga dampaknya akan dirasakan langsung oleh petani dan nelayan yang bergantung hidupnya pada kelestarian danau. Dampak dari rusaknya lingkungan di sekitar danau tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar danau, termasuk nelayan, petani, dan peternak Kerbau Kalang, namun juga warga Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda karena akibat kerusakan lingkungan danau tersebut, terjadi peningkatan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kerusakan tangkapan air di kawasan pedalaman menyebabkan air Sungai Mahakam meluap sehingga menyebabkan banjir.

2. Kawasan Delta Mahakam

Kawasan Delta Mahakam meliputi enam kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Angana, Muara Badak, dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai

bidang unggulan meliputi perikanan (pertambakan), pertambangan energi, sentra industri, dengan bidang penunjang utama pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Pusat pengembangan kawasan Delta Mahakam ini adalah Muara Badak.

Delta Mahakam terbentuk dari hasil sedimentasi selama ribuan tahun oleh Sungai Mahakam dimana secara administrative berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-sanga). Kawasan Delta Mahakam memiliki luas sekitar 1.500 km² (termasuk wilayah perairan) dengan luas wilayah daratan mencapai kurang lebih 1.000 km². Kawasan Delta Mahakam merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam (migas). Cadangan sumber daya alam terbesar terdapat di lapangan Peciko dan Tunu yang kini dieksploitasi perusahaan migas internasional asal Prancis, Total E&P Indonesia.

Wilayah daratan Delta Mahakam terbagi menjadi 4 zona vegetasi yaitu hutan tanaman keras tropis dataran rendah, hutan campuran tanaman keras dan palma dataran rendah, hutan rawa nipah, serta hutan bakau. Sebagian besar Delta ditutupi oleh hutan rawa nipah dan hutan bakau yang penyebarannya tergantung pada keberadaan air laut (sering disebut hutan mangrove).

Hutan mangrove memiliki keunggulan tersendiri dimana ekosistem mangrove merupakan habitat bagi beragam jenis biota laut. Penduduk setempat memanfaatkan kawasan ini sebagai areal tangkapan ikan, udang, dan kepiting. Kekayaan ekosistem Delta Mahakam sangat didukung oleh lokasinya di tepi barat Selat Makassar yang berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga arus laut yang mengalir kaya akan zat-zat nutrisi.

Sebaran hutan mangrove di dataran Delta Mahakam mengalami degradasi akut karena kegiatan pertambakan di Delta Mahakam telah melebihi daya dukung lingkungan. Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak sampai tahun 2002 di wilayah pesisir Delta Mahakam diperkirakan telah mencapai 80 persen dari luas areal asal (Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002). Perambahan hutan mangrove untuk pengusahaan tambak tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pemukiman nelayan di sepanjang perairan delta.

Perubahan ekosistem hutan mangrove menjadi areal pertambakan menyebabkan kondisi hidrologis Delta Mahakam berubah secara drastis. Hal ini terlihat dari pembukaan tambak baik ke arah hulu sungai dan muara sungai menyebabkan tingkat sedimentasi bertambah dan peningkatan erosi tanah sepanjang DAS. Pengaruh lain yang ditimbulkan adalah masuknya air tawar dari anak-anak Sungai Mahakam ke daerah mangrove yang dibuka untuk tambak menyebabkan adanya "*freshwater mangrove*" (hutan mangrove digenangi air tawar). Kondisi ini diakibatkan oleh adanya "*washing*" (pencucian oleh air tawar) pada daerah *intertidal zone* perairan Delta Mahakam.

3. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian.

Kawasan yang berada dalam wilayah perairan laut Kabupaten Berau ini terletak di dalam kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle*) yang diakui sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 75 persen dari seluruh spesies karang yang diketahui ilmu pengetahuan. Survey terakhir di perairan laut Berau menunjukkan bahwa kawasan ini mempunyai lebih dari 460 spesies karang, menjadikannya sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi ketiga di dunia, setelah kepulauan Solomon dan Raja Ampat. Studi tersebut juga mendokumentasikan lebih dari 870 spesies ikan, dari kuda laut yang kecil sampai pari manta raksasa, dan 10 spesies mamalia laut yang bermigrasi.

Kawasan laut ini dikenal sebagai tempat mencari makan dan tempat bertelur penyu laut terbesar di Asia Tenggara yang bermigrasi dari berbagai negara seperti Malaysia, Pilipina, dan Jepang. Selain itu, terdapat danau air laut di Pulau Kakaban yang merupakan danau laut terbesar di dunia dengan empat jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Hutan mangrove di Kabupaten Berau juga diakui sebagai hutan mangrove terbaik yang tersisa di pulau Kalimantan dengan luas 49.888 hektar.

Sayangnya, potensi sumber daya laut yang begitu besar tersebut terancam oleh aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang merusak lingkungan (penggunaan bom dan racun sianida), trawl ilegal, penjarahan penyu dan telurnya, penambangan karang, bekarang (reef gleaning), pengrusakan mangrove, penangkapan ikan berlebih, dan pencemaran laut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati No. 31/2005 tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau seluas 1,2 juta hektar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan untuk menjamin perikanan serta pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah mengeluarkan Keputusan Bupati No. 351 Tahun 2006 tentang kerangka penyusunan rencana pengelolaan KKL Berau. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, penyusunan rencana pengelolaan mesti mempertimbangkan aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pengelolaan dan kebijaksanaan, pembiayaan, dan kelembagaan.

6.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2013-2018) mendatang diarahkan untuk mendukung: (1) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan peningkatan aksesibilitas; (2) pengembangan prasarana wilayah untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah; (3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (4) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan lingkungan hidup; (5) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (6) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (7) pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, sesuai dengan rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan pola ruang wilayah diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW), pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai berikut.

Tabel 6.3
Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas
Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur

Pusat Kegiatan	Lokasi Kabupaten/Kota	Prioritas
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kota Balikpapan 2. Kota Samarinda 3. Kota Bontang 4. Tenggarong	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Prasarana Utama Perhubungan dan Perekonomian antarkota • Pengembangan Jalur Perhubungan Utama PKN (Trans Kalimantan)
2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	1. Kutai Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Batas Kawasan • Pengembangan Prasarana dan Sarana Penunjang Kawasan Perbatasan
3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Tahap I: 1. Sangatta (Kab. Kutai Timur) 2. Tanjung Redeb (Kab. Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan • Peningkatan/pengembangan Prasarana dan Sarana Utama Perhubungan (Terminal dan Pelabuhan Laut, Pelabuhan Industri Sangatta, Peningkatan Jalan Arteri)
	Tahap II: 1. Tanah Grogot (Kab. Pasir) 2. Sendawar (Kabupaten Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan • Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan • Pengembangan Prasarana Transportasi Utama (Terminal Tipe A dan Peningkatan Kualitas Jalan Penghubung Utama/Arteri Kawasan
	1. Penajam (Kab. Penajam Paser Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Penajam sebagai PKW

Pusat Kegiatan	Lokasi Kabupaten/Kota	Prioritas
		Promosi dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Studi Pengembangan Penajam sebagai PKW Promosi - Penyusunan/Penataan Ruang Kawasan Penajam - Pengembangan Prasarana dan Sarana Utama Perkotaan Kawasan Penajam (Pasar, Terminal tipe A, Prasarana dan Sarana Permukiman)
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Longikis (Kab. Paser) 2. Kuaro (Kab. Paser) 3. Muara Komam 4. Batu Kajang 5. Long Kali (Kabupaten paser) 6. Melak (Kabupaten Kutai Barat) 7. Muara Badak 8. Muara Jawa 9. Kota Bangun 10. Kembang Janggut (Kabupaten Kutai Kartanegara) 11. Muara Bengkal 12. Muara Wahau 13. Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur) 14. Merancang 15. Tepian Buah 16. Tanjung Batu 17. Talisayan 18. Mangkajang 19. Labanan (Kabupaten Berau) 20. Long Pujungan 22. Sekatak Buji 23. Tanah Kuning 24. Karang Agung 25. Bunyu Tengah 27. Petung (Kabupaten Penajam Paser Utara) 28. Sungai Nyamuk 29. Long Bawan 30. Long Layu 31. Atap	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan kapasitas perekonomian utama (pasar induk) • Peningkatan dan pengembangan terminal angkutan barang dan penumpang (terminal tipe A & B) • Pengembangan pelabuhan laut • Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan • Peningkatan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) • Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman • Pengembangan Prasarana dan Sarana Agropolitan /Minapolitan • Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan

Pusat Kegiatan	Lokasi Kabupaten/Kota	Prioritas
	32. Mensalong	

Dengan memperhatikan potensi wilayah, rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, serta zonasi dan kawasan industri, maka berikut ini strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

6.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Paser

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Paser menjadi kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Paser diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Cagar Alam Teluk Adang dan Cagar Alam Teluk Ampar, dan Kawasan Lindung Provinsi: Cagar Alam Teluk Adang dan Cagar Alam Teluk Ampar, dan Tanaman Hutan Rakyat Tanah Merah Petangis
- (2) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (3) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- (4) Kawasan Budidaya Perikanan;
- (5) Kawasan Budidaya Peternakan;
- (6) Kawasan Pertambangan;
- (7) Kawasan Pariwisata;
- (8) Kawasan Perkotaan;
- (9) Kawasan Perdesaan

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Paser dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Paser

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan dan Penggalian (14,4%)	1. Jasa (39,05%)	1. Pertambangan dan Penggalian (82,8%)	-	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Jasa-jasa (9,11%)	2. Pertanian (37,05%)	2. Pertanian (11,45%)	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	Revitalisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
				Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
				Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (9,08%)	3. Industri Pengolahan (23,90%)	3. Perdagangan, hotel dan restoran (3,30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Kutai Barat menjadi kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Barat diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Cagar Alam Padang Luwai, Kawasan Lindung Provinsi: Cagar Alam Kersik Luway;
- (2) Kawasan Hutan Produksi
- (3) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- (4) Kawasan Budidaya Peternakan;
- (5) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Minyak dan Gas Bumi;

- (6) Kawasan Pariwisata;
- (7) Kawasan Perkotaan;
- (8) Kawasan Perdesaan

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Barat dalam lima tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan dan Penggalian (8,62%)	1. Pertanian (63,16%)	1. Pertambangan dan Penggalian (57,92%)	-	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Pengangkutan dan Komunikasi (7,45%)	2. Jasa (22,98%)	2. Bangunan (15,18%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,51%)	3. Industri Pengolahan (13,86%)	3. Pertanian (12,45%)	<ul style="list-style-type: none"> • Durian holai • kakao • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit 	Revitalisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
				Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
					<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
				Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kawasan andalan dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Taman Nasional Kutai, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto; serta Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung, Cagar Alam Muara Kamam Sedulang, Hutan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan;
- (2) Kawasan Hutan Produksi;
- (3) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (4) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- (5) Kawasan Budidaya Perikanan;
- (6) Kawasan Budidaya Peternakan;
- (7) Kawasan Industri;
- (8) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (9) Kawasan Pariwisata;
- (10) Kawasan Perkotaan;
- (11) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
1. Listrik, Gas dan Air Bersih (14,61%)	1. Pertanian (42,56%)	1. Pertambangan dan Penggalian (83,95%)	-	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Pengangkutan dan Komunikasi (9,52%)	2. Jasa (33,93%)	2. Pertanian (6,45%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan SDM • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (9,20%)	3. Industri Pengolahan (23,51%)	3. Bangunan (3,24%)	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Lada • Kopi 	Revitalisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
				Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
				Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
					pendukung <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Kutai Timur menjadi kawasan andalan dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Taman Nasional Kutai; Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung, Cagar Alam Muara Kamam Sedulang, Taman Nasional Kutai, dan Kawasan Lindung Geologi/Kawasan Karst;
- (2) Kawasan Hutan Produksi;
- (3) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (4) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- (5) Kawasan Budidaya Perikanan;
- (6) Kawasan Budidaya Peternakan;
- (7) Kawasan Industri;
- (8) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (9) Kawasan Pariwisata;
- (10) Kawasan Perkotaan;
- (11) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.7

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perdagangan, Hotel dan Restoran (16,33%)	1. Pertanian (52,84%)	1. Pertambangan dan Penggalan (87,96%)		Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
2. Pertambangan dan Penggalian (11,54%)	2. Jasa (28,40%)	2. Pertanian (3,49%)	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kakao 	Revitalisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
3. Pengangkutan dan Komunikasi (5,80%)	3. Industri Pengolahan (18,76%)	3. Perdagangan, hotel dan restoran (3,44%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
				Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
				Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Berau

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Berau menjadi kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Berau diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Taman Wisata Alam Laut Berau (ulau Sagalaki dan Pula Semana), dan Kawasan Lindung Provinsi: Kawasan Lindung Geologi/Kawasan Karst;
- (2) Kawasan Hutan Produksi;
- (3) Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (4) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- (5) Kawasan Budidaya Perikanan;
- (6) Kawasan Budidaya Peternakan;
- (7) Kawasan Industri;
- (8) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (9) Kawasan Pariwisata;
- (10) Kawasan Perkotaan;
- (11) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.8
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Berau

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan dan Penggalian (11,26%)	1. Jasa (39,76%)	1. Pertambangan dan Penggalian (55,57%)	-	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (6,47%)	2. Pertanian (36,93%)	2. Pertanian (15,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kakao • Lada • Kopi 	Revitalisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
					<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
3. Pengangkutan dan Komunikasi (6,26%)	3. Industri Pengolahan (23,31%)	3. Perdagangan, hotel dan restoran (11,31%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
		4. Industri Pengolahan (7,56%)	-	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
				Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kawasan andalan dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, dan Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung;
- (2) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (3) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- (4) Kawasan Budidaya Peternakan;
- (5) Kawasan Industri;
- (6) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (7) Kawasan Pariwisata;
- (8) Kawasan Perkotaan;

(9) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengangkutan dan Komunikasi (18,93%)	1. Jasa (44,19%)	1. Pertambangan dan Penggalian (39,07%)	-	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan groind • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (12,92%)	2. Pertanian (36,37%)	2. Perdagangan, hotel dan restoran (17,21%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
3. Listrik, Gas dan Air Bersih (11,82%)	3. Industri Pengolahan (19,44%)	3. Pertanian (16,51%)	<ul style="list-style-type: none"> • Singkong • Gajah • Padi • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Lada 	Revitalisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
		4. Industri Pengolahan (14,46%)		Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
					kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
				Pengembangan groindu pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kota Balikpapan menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda (Sanga sanga-Muara Jawa-Balikpapan-KAPET SASAMBA), dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kota Balikpapan diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung dan Hutan Pendidikan Sungai Wain dan Km 23;
- (2) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (3) Kawasan Budidaya Perikanan;
- (4) Kawasan Industri;
- (5) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (6) Kawasan Pariwisata;
- (7) Kawasan Perkotaan;
- (8) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Balikpapan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.10
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bangunan (16,79%)	1. Jasa (69,15%)	1. Industri Pengolahan (45,19%)	<ul style="list-style-type: none"> • Pepaya mini • Rumput laut • Karet 	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan groindustry tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
					<ul style="list-style-type: none"> perkebunan Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan Pengembangan minapolitan
2. Listrik, Gas dan Air Bersih (15,4%)	2. Industri Pengolahan (22,53%)	2. Bangunan (19,86%)	-	Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan iklim usaha dan investasi Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (12,92%)	3. Pertanian (8,32%)	3. Perdagangan, hotel dan restoran (16,60%)	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam Wisata seni dan budaya Wisata kuliner Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan tempat wisata Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya Peningkatan sumber daya manusia Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
		4. Pengangkutan dan Komunikasi (8,24%)			

6.2.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kota Samarinda menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda (Sanga sanga-Muara Jawa-Balikpapan-KAPET SASAMBA), dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kota Samarinda diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Provinsi: Kebun Raya Samarinda;
- (2) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- (3) Kawasan Industri;
- (4) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (5) Kawasan Pariwisata;
- (6) Kawasan Perkotaan;
- (7) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.11
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda

Sektor Utama	Komoditas	Strategi	Kebijakan
--------------	-----------	----------	-----------

Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah	Utama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan dan Penggalian (34,372%)	1. Jasa (65,17%)	1. Perdagangan, hotel dan restoran (38,49%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,10%)	2. Industri Pengolahan (29,97%)	2. Industri pengolahan (14,16%)	Kelapa Sawit	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan • Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan • Pengembangan minapolitan
3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7,96%)	3. Pertanian (4,86%)	3. Pertambangan dan penggalian (12,25%) 4. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (11,52%)	-	Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

6.2.9 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Bontang

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kota Bontang menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kota Bontang diarahkan menjadi:

- (1) Kawasan Lindung Nasional: Taman Nasional Kutai, Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung;
- (2) Kawasan Budidaya Perikanan;
- (3) Kawasan Industri;
- (4) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (5) Kawasan Pariwisata;
- (6) Kawasan Perkotaan;
- (7) Kawasan Perdesaan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Bontang dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.11
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Bontang

Sektor Utama			Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Listrik, Gas dan Air Bersih (6,94%)	1. Jasa (31,28%)	1. Industri pengolahan (94,07%)	Rumput laut	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agroindustri • Pengembangan kelautan dan perikanan
				Pengembangan industri pengolahan non migas	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
2. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5,80%)	2. Industri Pengolahan (20,87%)	2. Bangunan (2,24%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Industri 	Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
3. Jasa-jasa (5,45%)	3. Angkutan dan komunikasi (.....)	3. Perdagangan, hotel dan restoran (1,35%)			